BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh. (Lembaga Administrasi Negara, 2000).

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam PP No. 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang dituangkan dalam kerangka Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pengelola keuangan daerah selaku pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. (Bastian, 2006 : 275).

Fenomena yang diperoleh terkait kinerja pada pemerintah adalah Kinerja aparatur pemerintah daerah di Indonesia selama 2016 masih rendah. Menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang. MenPAN RB Asman Abnur menyatakan, berdasar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87. Sebanyak 425 pemerintah daerah, atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C Angka itu naik sedikit dari rata-rata nilai tahun sebelumnya, 46,39. (Asman Abnur, 2016)

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (2018) yaitu bila dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan di awal perencanaan merencanakan anggaran sebesar Rp. 100 milliar untuk menargetkan 3 lahan tanah, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi, hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program

dan aktivitas dalam satuan moneter. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan . (Mardiasmo, 2005 : 22).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016. Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, hingga rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. " Sasaranya nggak jelas mau bikin apa, nggak tahu, bikin aja kegiatan *outcome* nggak tahu." kata ateh. (Yosef Ateh, 2018)

Menurut Kepala Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung, Iis Diana (2018), yang menjadi masalah terkait ketidakjelasan sasaran anggaran dalam penilaian kinerja keuangan bila pada proses awal dalam menganggarakan dana yang tidak jelas maka pada proses akhirnya pun anggarannya tidak akan jelas dan tidak akan terserap, Misalkan semua kertas polio, perlu 5 rim, maka harus 5 rim atau kurang dari 5 rim tidak apa-apa. Asalkan tidak melewati yang sudah ditentukan yaitu 5 rim, jika melewati dari 5 rim maka akan menyebabkan angarannya tidak jelas di hasil akhir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lintas (2013) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya penelitian Gunawan Azmi, Darwani, Syukryi Abdullah (2014) menemukan bahwa

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara, tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo, 2002:20)

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. (Mardiasmo, 2009 : 121).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan saat ini mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) masih memiliki nilai akuntabilitas di bawah standar, yaitu di bawah B sepanjang 2016. Masih rendahnya akuntabilitas pemda dari harapan inilah yang dikatakan Asman menjadi pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Salah satu cara dengan memberikan contoh pemda yang memiliki nilai rata-rata akuntabilitas yang lebih baik, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih predikat A dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016, diharapkan langkah ini juga dapat segera diikuti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jabar lainnya," kata abnur. Dia mengungkap, masih banyak pemda yang memiliki nilai akuntabilitas rendah tersebut menyebabkan sasaran pembangunan tidak sesuai harapan, sehingga telah menyebabkan pemborosan keuangan negara hingga mencapai nilai Rp 400 triliun.

Jumlah itu sangat fantastis mengingat saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur. Untuk itu, MenPANRB telah menargetkan pada 2017, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota harus memiliki nilai akuntabilitas minimal B (baik). "Kita harus mengakui, bahwa sampai saat ini masih banyak program yang belum mengikuti prinsip *performance based budgeting*, pembangunan yang belum tepat sasaran, program dan kegiatan tidak nyambung, juga tidak menutup masih adanya proyek titipan. Ini semua telah menyebabkan pemborosan keuangan negara yang luar biasa, sehingga tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif serta efisien belum bisa kita capai," tambah Asman. (Asman Abnur, 2017)

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. (Maryanto, 2014:7)

Penelitian yang dilakukan oleh Tari Mellisa Rafar, Heru Fahlevi, Hasan Basri (2015) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Auditya et. al. (2013) menemukan dalam penelitiannya bahwa, akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Auditya et al. (2013) juga mengemukan dalam penelitiannya bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD, kinerja akan semakin meningkat. Tingginya akuntabilitas pada pengelolaan

keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan investasi.Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Berdasarkan Permasalahan di atas Penulis tertarik untuk meneliti tentang "**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**".

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono (2017:32), "Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan." Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya kinerja pemerintah daerah disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas pemerintah.
2. Kejelasan sasaran anggaran dinilai masih lemah dikarenakan ukuran kinerja yang tidak jelas serta tidak ada kejelasan hasil yang dicapai.
3. Lemahnya akuntabilitas dikarenakan kinerja pemerintah yang kurang memuaskan dan kurang memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2017:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas mengenai Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprinal (2014:105), “Maksud penelitian adalah sub bab dimana penelitian mengemukakan manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai.”

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprinal (2014:104), "Tujuan penelitian adalah hal-hal objektif apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh peneliti, berkaitan dengan hal-hal yang dipertanyakan pada rumusan masalah."

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Sugiyono (2013:305), adalah sebagai berikut :

"Merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis."

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis menurut Uma Sekaran (2011:9), adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut, meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan memahami metode untuk memecahkannya.

Bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan dalam memecahkan masalah yang dialami oleh instansi sektor publik khususnya dalam memecahkan masalah mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis menurut Uma Sekaran (2011:10), adalah sebagai berikut :

> "Kegunaan akademis untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut."

1. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

   Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan SKPD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sehingga SKPD diharapkan dapat membuat program yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan akuntabilitas dilingkungan pemerintahan.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk pengembangan serta sumber informasi atau masukan mengenai pentingnya Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.